



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
MENURUT PENGELUARAN  
2016 - 2020





PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
MENURUT PENGELUARAN  
2016 - 2020

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**MENURUT PENGELUARAN 2016-2020**

ISSN/ ISBN : -  
No. Publikasi : 82030.2004  
Katalog : 9302021.8203

Ukuran Buku : 21 cm X 29,7 cm  
Jumlah Halaman : ix + 67 halaman

Naskah:  
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik  
Desain Kover oleh:  
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Penerbit:  
BPS Kabupaten Kepulauan Sula

Pencetak:  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

Sumber Ilustrasi: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## **TIM PENYUSUN**

### **Penanggungjawab Umum:**

Ahmad Abdurrahman, SST

### **Penyunting:**

Mochammad Alwan, S.Tr.Stat

### **Penulis:**

Endang Maulani Umaternate, SST

### **Pengolah Data:**

Endang Maulani Umaternate, SST

### **Gambar Kulit:**

Seksi IPDS BPS Kabupaten Kepulauan Sula



## KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Sula Menurut Pengeluaran 2016-2020 merupakan kelanjutan dari penerbitan publikasi tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Kabupaten Kepulauan Sula. Angka PDRB dalam publikasi ini menggunakan PDRB dengan tahun dasar 2010 dengan penyempurnaan metodologi serta ruang lingkup dengan mengacu pada *System National Accounts* 2008 (SNA 2008).

Publikasi ini menyajikan gambaran perekonomian Kabupaten Kepulauan Sula secara deskriptif selama kurun waktu 2016-2020 melalui pendekatan pengeluaran dalam bentuk konsumsi, investasi, maupun ekspor impor. Dalam publikasi ini disajikan berbagai jenis tabel PDRB tahun 2016-2020 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase. Perlu diketahui bahwa angka PDRB tahun 2019 yang disajikan bersifat sementara sedangkan tahun 2020 bersifat sangat sementara.

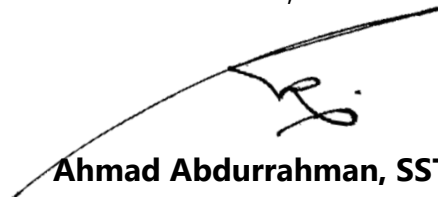
Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula sehingga memungkinkan terbitnya buku ini. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan publikasi mendatang.

Terimakasih.

Sanana Utara, April 2021

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPALA,



**Ahmad Abdurrahman, SST**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto .....	8
<b>II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA</b> .....	<b>15</b>
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	17
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga .....	20
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	23
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	27
2.5 Perubahan Inventori.....	31
2.6 Ekspor Impor.....	35
<b>III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA</b> .....	<b>37</b>
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran .....	39
<b>IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA</b> .....	<b>53</b>
4.1 PDRB Nominal .....	55
4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB .....	57
4.3 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) .....	59



<b>V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
<b>VI LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>
<b>VII DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>

<https://kepsulkab.bps.go.id>



## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman/ Page</b>
Tabel 1.1	Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	13
Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Sula, 2016-2020	55
Tabel 4.2	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Sula, 2016-2020	57
Tabel 4.3	Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Kepulauan Sula, 2016-2020	60



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman/ Page</b>
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula, 2016-2020	40
Gambar 3.2 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula, 2016-2020	42
Gambar 3.3 Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Sula, 2016-2020	44
Gambar 3.4 Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula, 2016-2020	47
Gambar 3.5 Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula, 2016-2020	50



## DAFTAR LAMPIRAN

		<b>Halaman/ Page</b>
Tabel 1	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula (Miliar Rupiah), 2016-2020	69
Tabel 2	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula (Miliar Rupiah), 2016-2020	70
Tabel 3	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula (Persen), 2016-2020	71
Tabel 4	Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula (Persen), 2016-2020	72
Tabel 5	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula (Persen), 2016-2020	73







# PENDAHULUAN



## Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*framework*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)<sup>1</sup>. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku

---

<sup>1</sup> Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep-konsep penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi "akhir" oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk "permintaan akhir". Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah

domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak memperlakukan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat<sup>2</sup>, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari

---

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik  
- Disebut sebagai pendekatan “riil”  
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Keterangan	
Y (Income)	PDRB Produksi
C (Consumption)	Konsumsi akhir
GFCF (Gross Fixed Capital Formation)	Pembentukan Modal Tetap Bruto
$\Delta$ Inventori	Perubahan Inventori
X	Ekspor
M	Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan "identik" dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta  $\Delta$  Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai "ekspor neto".

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan "riil", serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

<https://kepsulkab.bps.go.id>

## Perubahan Tahun Dasar PDRB

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

### Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan



klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

### **Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?**

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

### **Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?**

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling*

d. dan *forecasting*.

### **Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?**

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun<sup>3</sup>;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

### **Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010**

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

---

<sup>3</sup> SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- Konsep dan Cakupan
  - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
  - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
  - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
  - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
  - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.

- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi  
Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.
  - Valuasi  
Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

**Tabel 1.1 Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010**

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor





# **METODE ESTIMASI & SUMBER DATA**





# Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)

## Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran<sup>4</sup>. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

## Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

## Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol

---

<sup>4</sup> Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

### **Sumber Data**

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS

- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

### **Metode Estimasi**

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

# Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PKLNPRT)

## Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

## Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

## Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

## Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

## Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

13. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
14. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
15. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
16. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
17. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
18. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

# Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP)

## Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer.

Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar. Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

## Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

### **Cakupan**

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

### **Sumber Data**

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS



- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

### Metode Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

$$\begin{aligned}
 \text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = & \text{Output} - \\
 & \text{Penjualan barang dan jasa} + \\
 & \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\
 & \text{Output Bank Indonesia}
 \end{aligned}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

<https://kepsulkab.bps.go.id>

# Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

## Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

## Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

## Cakupan

Cakupan dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

## Sumber Data

Dalam melakukan penghitungan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terdapat berbagai macam jenis data yang diperlukan baik primer maupun sekunder. Data yang sekunder yang dibutuhkan dalam penghitungan PMTB bersumber dari kementerian maupun

lembaga lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan data pendukung. Berikut ini merupakan jenis data yang digunakan untuk menghasilkan angka PMTB:

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

### **Metode estimasi**

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ **Metode Langsung:**

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar

harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metode Tidak Langsung:

Pendekatan Supply :  $PMTB \text{ atas dasar harga Berlaku} = \text{Total Supply Barang} \times$

Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi :  $PMTB \text{ atas dasar harga Konstan (t)} = PMTB \text{ atas dasar harga}$

Konstan (t-1) x Indeks Produksi (t)

# Perubahan Inventori (PI)

## Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

## Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

## **Cakupan**

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);



- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

### **Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjenk Kementan.

### **Metode Estimasi**

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau deflasi berdasarkan jenis komoditas.

a. Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) – Volume inventori (t-1)) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) - Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

# Ekspor Impor

## Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

## Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

## Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota

- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

### **Sumber Data**

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.





**TINJAUAN PEREKONOMIAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
2016-2020**



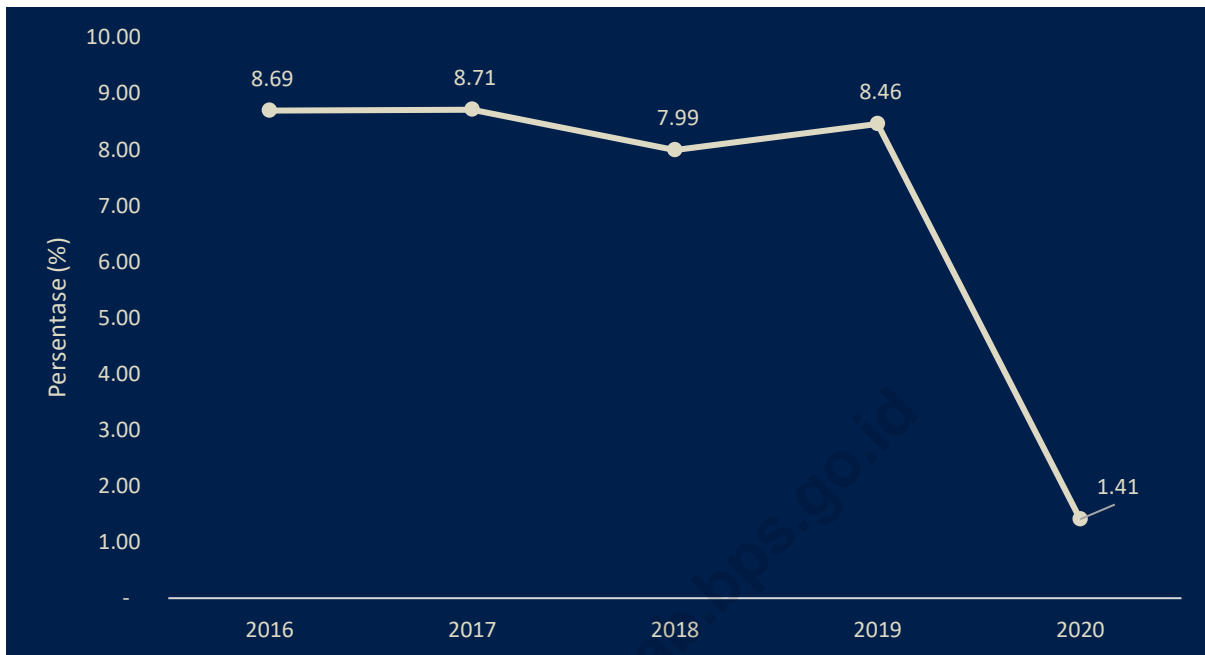
Angka PDRB Kabupaten Kepulauan Sula terus menunjukkan tren positif dari waktu ke waktu. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula mencatat terjadi peningkatan laju pertumbuhan berturut-turut pada tahun 2018 hingga 2019. Rata-rata laju pertumbuhan sepanjang 2015 hingga 2019 mencapai 5,53 persen. Artinya, ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula mengalami cukup banyak perubahan positif dalam 5 tahun terakhir.

Pada tahun 2016, angka PDRB Kabupaten Kepulauan Sula Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terhitung sebesar kurang lebih 1,94 triliun rupiah. Dari sisi pengeluaran, lebih dari setengah angka PDRB tersebut yakni sekitar 55,52 persen disumbang oleh konsumsi rumah tangga. Angka PDRB ADHB pada tahun 2016 meningkat sebesar 155,78 miliar rupiah dari tahun 2015. Hingga tahun 2020, angka PDRB ADHB Kabupaten Kepulauan Sula telah meningkat sebesar 567,18 miliar rupiah dari tahun 2016. Total PDRB ADHB Kabupaten Kepulauan Sula mencapai kurang lebih 2,51 triliun rupiah pada tahun 2020.

Sepanjang periode 2016 hingga 2020, peningkatan PDRB ADHB tertinggi terjadi di tahun 2019 dan terendah terjadi di tahun 2020. Pada tahun 2020, total PDRB hanya meningkat sekitar kurang lebih 34,94 miliar rupiah. Fenomena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi penyebab utama penurunan laju pertumbuhan angka PDRB di hampir setiap kabupaten kota di Maluku Utara tidak terkecuali Kepulauan Sula. Gambaran mengenai perubahan PDRB Kabupaten Kepulauan Sula dari waktu ke waktu tercermin dalam gambar di bawah ini.



**Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula, 2016-2020**



Perekonomian Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2020 dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT). Kondisi ini sejalan dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya dimana PKRT selalu menjadi penyumbang terbesar total PDRB Kepulauan Sula. Angka PKRT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 PKRT Kabupaten Kepulauan Sula dinilai mampu mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu sekitar 50,06 miliar dari tahun 2019 atas dasar harga berlaku meskipun di tengah pandemi Covid-19. Peningkatan pada komponen PKRT ini menjadi stimulus yang besar bagi total PDRB Kabupaten Kepulauan Sula di masa pandemi. Akibatnya, angka PDRB Kabupaten Kepulauan Sula masih dapat tumbuh positif di tahun 2020.

Di sisi lain, perubahan yang berarti juga terjadi pada komponen net ekspor. Net ekspor Kabupaten Kepulauan Sula sepanjang tahun 2020 meningkat ke positif 42,90 miliar rupiah.

Angka ini meningkat cukup drastis jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Meskipun adanya pandemi Covid-19 menyebabkan terhambatnya arus masuk keluar barang sebagai dampak dari kebijakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula akan larangan operasi transportasi baik laut maupun udara selama sebulan penuh serta beberapa kebijakan tentang penerapan protokol kesehatan pada transportasi laut yang cukup intensif di bulan-bulan berikutnya.

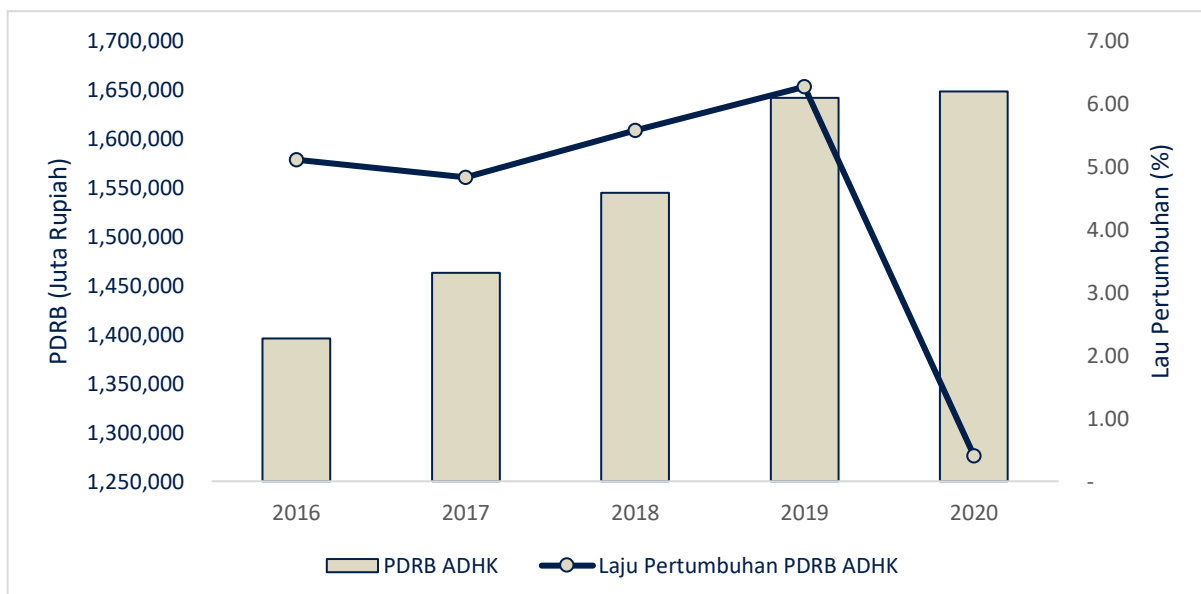
Net ekspor Kepulauan Sula masih mampu menciptakan angka yang positif. Jika ditinjau lebih jauh, jenis komoditas ekspor dan impor cenderung berbeda signifikan. Komoditas ekspor Kepulauan Sula rata-rata merupakan komoditas barang jadi mentahan sedangkan komoditas impor berfokus pada barang jadi olahan. Dari sifatnya, komoditas ekspor Kepulauan Sula cenderung merupakan bahan baku untuk proses olahan berikutnya dan nilainya secara agregat cenderung lebih besar. Contoh komoditas ekspor yang dapat ditemukan di Kabupaten Kepulauan Sula yakni ikan tuna, hasil perkebunan tahunan seperti cengkeh, kacang metete, dan cokelat, serta sarang burung wallet. Komoditas hasil perkebunan tahunan dapat disimpan dalam waktu tertentu. Ketika larangan operasi kapal laut dilakukan dan arus keluar barang terhambat, komoditas-komoditas ini masih dapat diekspor pada bulan berikutnya. Sementara di sisi impor, terhambatnya arus masuk barang akan memengaruhi nilai total impor yang cukup signifikan. Penurunan nilai impor inilah yang berdampak pada nilai total net ekspor Kabupaten Kepulauan Sula di tahun 2020.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini dapat menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Indikator tersebut diperoleh dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang

divaluasi dengan harga tahun 2010. Penilaian PDRB atas dasar harga konstan akan memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 juga dapat menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil yang ditunjukkan dengan perubahan volume permintaan atau konsumsi barang dan jasa di suatu wilayah .

Jika dinilai berdasarkan harga konstan, PDRB Kepulauan Sula juga menunjukkan adanya perubahan yang positif dari tahun ke tahun namun mengalami perlambatan yang cukup signifikan di tahun 2020. Berdasarkan Tabel 3.2, pada tahun 2020, PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kepulauan Sula tercatat sebesar 1,647 triliun rupiah. Angka PDRB ADHK tersebut meningkat sebesar 6,65 miliar rupiah atau hanya tumbuh sebesar 0,41 persen dari PDRB tahun 2019. Berikut ini merupakan gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula selama 5 tahun terakhir.

**Gambar 3.2 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula, 2016-2020**



Berdasarkan gambar 3.2 terlihat bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Sula mengalami dampak yang cukup serius akibat adanya Covid-19. Penurunan laju pertumbuhan yang begitu signifikan terjadi di tahun 2020. Sebelumnya di tahun 2019, ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula mampu tumbuh sebesar 6,27 persen. Peningkatan konsumsi rumah tangga, konsumsi Inprt, dan konsumsi pemerintah, serta net ekspor menjadi pemacu laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula di tahun 2019. Sementara di tahun 2020, terjadi perlambatan laju pertumbuhan serta penurunan angka PDRB di beberapa komponen. Akibatnya, terjadi penurunan laju pertumbuhan yang cukup tajam pada PDRB Kabupaten Kepulauan Sula secara total di tahun 2020.

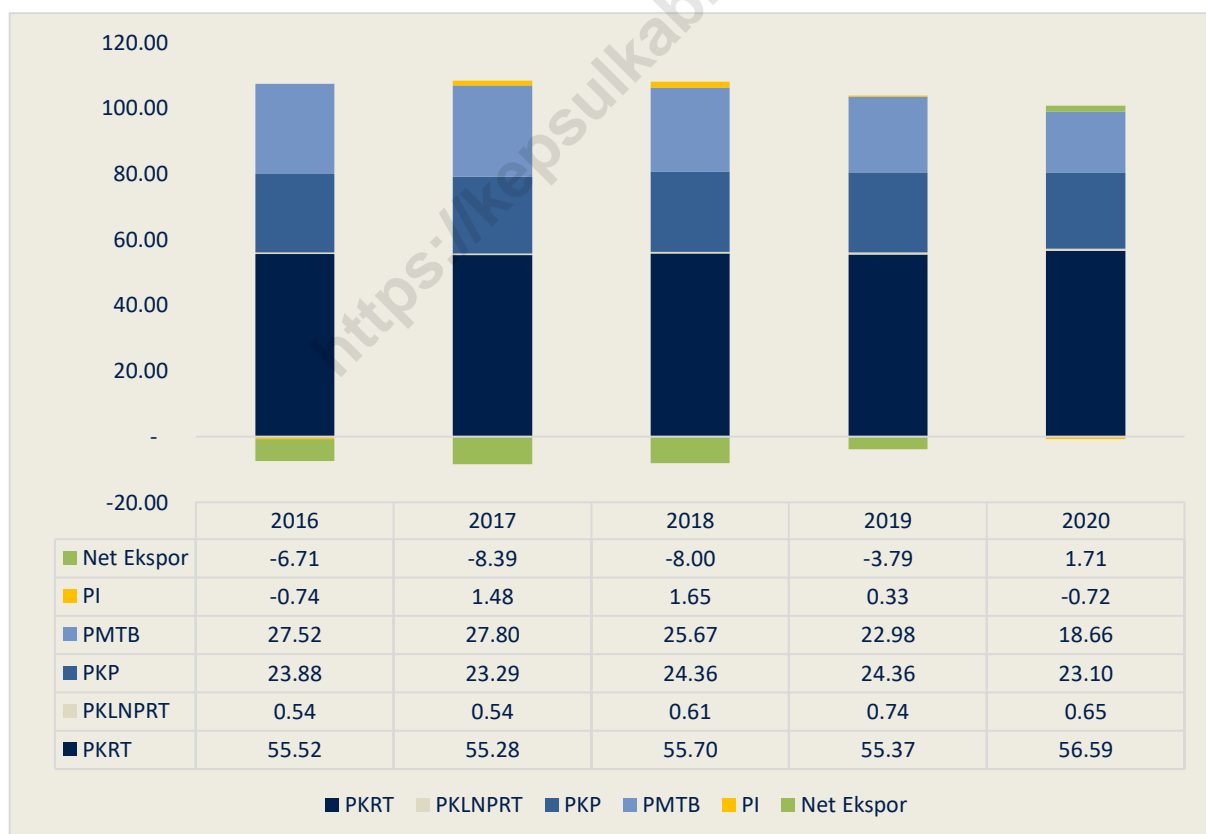
#### **Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Periode 2016-2020**

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor Neto (E) atau Ekspor minus Impor barang dan jasa.

Dari Gambar 3.3 terlihat bahwa selama periode 2016-2020, PDRB Kabupaten Kepulauan Sula sebagian besar disumbangkan oleh konsumsi akhir rumah tangga (PKRT). Pada tahun 2019, kontribusi PKRT terhadap total PDRB Kepulauan Sula dari sisi pengeluaran adalah 56,11 persen dan menjadi 56,39 persen di tahun 2020. Disamping itu, pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 20,62 persen pada tahun 2020. Sementara itu, net ekspor menunjukkan kontribusi yang negatif namun mengalami pertumbuhan terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Sula. Meningkatnya

angka kontribusi net ekspor menunjukkan bahwa sumbangsih ekspor barang/jasa lebih besar dibandingkan nilai impornya khususnya di tahun 2020. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya, meskipun kebutuhan domestik masih banyak dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor), peningkatan ekspor mampu mendorong terciptanya net ekspor positif meski di tengah pandemi Covid-19. Terciptanya net ekspor yang positif tidak terlepas dari menurunnya nilai impor akibat kebijakan pemerintah daerah akan larangan dan pembatasan operasi transportasi laut maupun udara pada masa pandemic Covid-19.

**Gambar 3.3 Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula, 2016-2020**



Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Konsumsi Pemerintah merupakan komponen yang mengalami penurunan distribusi terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Sula. Penurunan

distribusi disebabkan oleh menurunnya angka PDRB ADHB khususnya pada 2 komponen tersebut di Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2020. Pada tahun 2020, kontribusi Pengeluaran Konsumsi LNPRT terhadap total PDRB Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 0,65 persen. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,74 persen. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap total PDRB Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2020 sebesar 23,10 persen. Kontribusi tersebut menurun dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 24,36 persen. Seiring dengan menurunnya kontribusi 2 komponen tersebut, PKRT justru mengalami peningkatan distribusi di tengah pandemi di tahun 2020.

### **Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula Menurut Komponen Penyusun PDRB Pengeluaran 2016-2020**

Sebagaimana terlihat dari Gambar 3.2, perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula di tahun 2020 dapat dijelaskan dengan menelaah perubahan di masing-masing komponen penyusun angka PDRB Pengeluaran tersebut. Analisis ini akan memberikan gambaran dari perlambatan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula secara lebih fokus.

Sebagai komponen yang berkontribusi paling besar terhadap total PDRB, PKRT mampu menstimulus total PDRB tumbuh ke arah positif meski dalam masa pandemi. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah guna memutus rantai penyebaran Covid-19 berdampak besar bagi produksi dan distribusi barang. Akan tetapi, konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh positif walau mengalami perlambatan.

Fenomena ini dapat dijelaskan. Intensifnya kebijakan pemerintah khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula yang memperketat dan mengatur aktivitas masyarakat di tempat umum terjadi pada sekitar bulan Maret-Juni 2020. Meskipun terdapat larangan-larangan

transportasi laut dan udara yang menghambat mobilitas penumpang dan barang, mulai Juli 2020, aktivitas masyarakat menjadi normal kembali secara perlahan. Larangan keluar masuk mulai diperlonggar terutama untuk arus masuk keluar barang. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk kembali konsumtif.

*Online Shop* masih menjadi fenomena yang layak dikaitkan. Adanya larangan bepergian dan aturan yang ketat menyebabkan sebagian orang tidak dapat melakukan belanja langsung. *Online shop* menjadi pilihan yang dapat mengakomodir kebutuhan belanja masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Hal ini didukung oleh peningkatan PDRB menurut Lapangan Usaha khususnya pada Pergudangan, Jasa Penunjang Angkutan, Pos, dan Kurir yang tumbuh positif di tahun 2020 meski di tengah Covid-19. Akibatnya, konsumsi rumah tangga di tahun 2020 masih dapat tumbuh positif sebesar 0,91 persen dari tahun 2019 atau mengalami peningkatan sebesar 50 miliar rupiah dari konsumsi rumah tangga tahun 2019.

Nilai PKLNPRRT Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan harga konstan mengalami penurunan yang disertai dengan penurunan pertumbuhan. Pada tahun 2019, PDRB ADHK PKLNPRRT adalah sebesar 12,56 miliar rupiah. Angka tersebut mengalami pengurangan sebesar 1,30 miliar rupiah atau mengalami penurunan sekitar 10,39 persen sehingga menjadi 11,25 miliar rupiah pada tahun 2020.

**Gambar 3.4 Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula, 2016-2020**



Hal serupa juga terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) dan PMTB. Pada tahun 2019 angka PDRB PKP adalah sebesar 403,09 miliar rupiah. Angka tersebut menurun cukup signifikan yaitu sebesar 18,41 miliar rupiah atau mengalami kontraksi sebesar 4,57 persen di tahun 2020. Konsumsi pemerintah merupakan salah satu komponen yang paling berdampak pada masa pandemi. Terjadi peralihan anggaran besar-besaran guna menanggulangi biaya operasional penganggulangan Covid-19 khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula. Salah satu peralihan anggaran yang cukup besar terjadi pada belanja pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Sementara itu, PMTB juga



mengalami penurunan dengan laju yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, angka PDRB Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebesar 339,76 miliar rupiah. Angka tersebut mengalami kontraksi yang cukup signifikan yakni sebesar 20,40 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2019. Hal ini terjadi sering dengan peralihan anggaran yang terjadi akibat Covid-19 di APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula karena sebagian besar pembentukan modal tetap di Kabupaten Kepulauan Sula dikelola oleh pemerintah daerah sendiri.

Sejalan dengan kondisi sebelumnya, Net Ekspor Kepulauan Sula tumbuh positif dan signifikan di tahun 2020. Peningkatan net ekspor yang disebabkan oleh menurunnya nilai impor akibat terhambatnya mobilitas barang di masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu pemacu perubahan pada total PDRB ADHK Kabupaten Kepulauan Sula yang tumbuh ke arah positif. Meskipun total kontribusi hanya 1,71 persen dari total PDRB, net ekspor menjadi 1 dari 2 komponen PDRB Pengeluaran yang mampu menciptakan pertumbuhan positif selama tahun 2020. Net ekspor ADHK Kepulauan Sula di tahun 2020 tumbuh sebesar 93,92 persen atau mengalami penambahan sebanyak 118,84 miliar rupiah dari net ekspor tahun 2019.

Peningkatan net ekspor ini menjadi harapan baru bagi sektor-sektor produksi di Kabupaten Kepulauan Sula. Peningkatan ekspor dapat membawa beberapa *positive impact* bagi perekonomian Kabupaten Kepulauan Sula salah satunya ialah peningkatan produksi. Hingga tahun 2020, tercatat satu lapangan usaha yang sudah melakukan ekspor Luar Negeri yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diantaranya yaitu ekspor ikan ke Amerika Serikat. Peningkatan net ekspor bisa menciptakan sentimen positif bagi industri baru yang tumbuh di Kabupaten Kepulauan Sula. Kedepannya peningkatan ini dapat menjadi pemacu bagi industri baru tersebut untuk turut melakukan ekspor ke luar wilayah Kabupaten Kepulauan

Sula. Mengingat pengaruh positifnya terhadap sektor-sektor lain yang menjadi penyuplai bahan baku dan bahan penolong produksi bagi pelaku ekspor, penting bagi pemerintah daerah untuk semakin memerhatikan kebijakan ekspor yang aman dan mendukung para pengusaha agar nantinya dapat membawa dampak positif bagi perekonomian dalam daerah.

### **Indeks Implisit dan Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran**

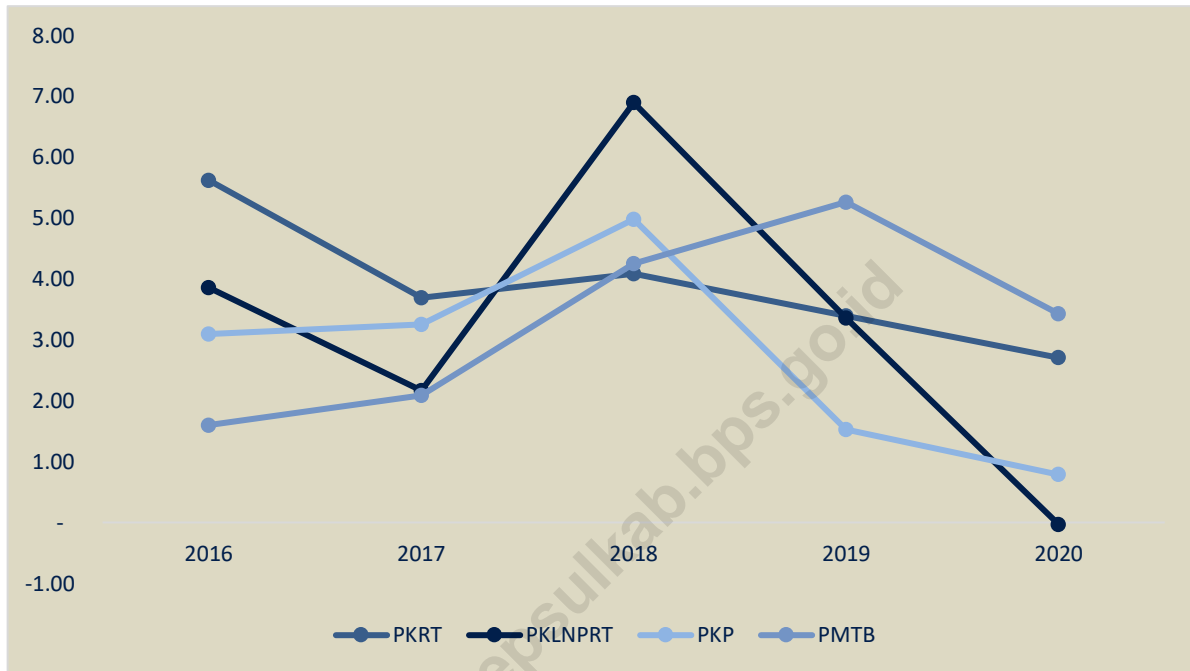
Indeks implisit<sup>5</sup> merupakan perbandingan antara PDRB ADHB terhadap PDRB ADHK. Indeks implisit PDRB pengeluaran mampu menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen yakni rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan dalam bentuk konsumsi barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi akhir, investasi maupun ekspor/impor di suatu wilayah pada periode tertentu terhadap harga pada periode tahun dasar (2010) (BPS, 2020). Pertumbuhan indeks implisit menunjukkan laju perubahan harga dari tahun ke tahun terhadap harga tahun dasar (2010).

Pada tahun 2020, kenaikan harga paling tinggi terjadi pada barang modal tetap. Indeks Implisit PMTB meningkat sebesar 3,43 persen dibandingkan indeks implisit di tahun 2019. Pada tahun 2019, indeks implisit PMTB sebesar 133,57. Ini menunjukkan bahwa, rata-rata harga barang-modal tetap meningkat sebesar 1,33 kali harga tahun dasar (2010). Angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 138,15 di tahun 2020. Artinya terjadi perubahan harga di tahun 2020 sebesar 1,38 kali harga tahun dasar 2010. Gambar 3.5 akan menunjukkan secara lebih jelas tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2016-2020, baik perubahan harga konsumen yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

---

<sup>5</sup> Indeks perkembangan

**Gambar 3.5 Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Pengeluaran  
Kabupaten Kepulauan Sula 2016-2020**



Perubahan harga cukup tinggi juga terjadi pada barang/jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Indeks implisit konsumsi rumah tangga menunjukkan perubahan rata-rata harga barang/jasa yang dikonsumsi pemerintah sebesar 1,53 kali harga pada tahun dasar (2010). Indeks implisit tersebut meningkat sebesar 2,71 persen dari kondisi tahun 2019 dimana pada tahun 2019, rata-rata harga barang-barang meningkat 1,49 kali harga dasar tahun 2019.

Di sisi lain, rata-rata harga barang yang dikonsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan indeks implisit untuk barang yang dikonsumsi LNPRT berkontraksi sebesar 0,03 persen. Artinya, peningkatan harga yang terjadi di tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan peningkatan harga yang terjadi di tahun 2020 meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2019, rata-rata harga barang yang dikonsumsi LNPRT mengalami peningkatan

sebesar 1,463 kali harga tahun 2010 sedangkan pada tahun 2020, rata-rata harga barang yang dikonsumsi oleh LNPRT mengalami peningkatan sebesar 1,462 kali harga tahun dasar 2010.

Terdapat suatu fenomena yang dapat menjelaskan hal tersebut. Pada tahun 2019, masyarakat melakukan pemilihan umum presiden serta anggota DPR baik pusat dan daerah. Di tahun 2020, masyarakat juga melakukan pemilihan umum kepala daerah. Yang membedakan adalah intensitas kegiatan LNPRT di tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019, adanya pemilihan umum memengaruhi peningkatan konsumsi LNPRT di tahun tersebut. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pertumbuhan LNPRT di tahun 2019 sebesar 27,15 persen. Pemilihan umum menyebabkan peningkatan aktivitas dari LNPRT tersebut. Adanya momentum pemilihan umum juga dapat dijadikan waktu yang baik bagi partai politik untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara di tahun 2020, intensitas kegiatan LNPRT sedikit terganggu dengan adanya Covid-19. Hal ini tercermin dari konsumsi LNPRT di tahun 2020 yang tumbuh negatif 10,39 persen. Peningkatan aktivitas berkaitan erat dengan permintaan barang konsumsi. Tingginya permintaan berpengaruh terhadap perubahan harga sehingga hal tersebut mungkin berdampak terhadap perubahan indeks implisit di tahun 2019 dan 2020.





**PERKEMBANGAN AGREGAT  
PDRB PENGELUARAN  
2016-2020**



## PDRB Nominal

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

PDRB Nominal menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan. Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

**Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Sula, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB Perkapita					
a. ADHB (juta Rp)	20.05	21.35	22.65	24.11	23.96
b. ADHK 2010 (juta Rp)	14.36	14.75	15.30	15.95	15.70
Pertumbuhan PDRB Perkapita (%)	3.06	2.69	3.72	4.28	-1.59
Jumlah penduduk	97,177	99,196	100,967	102,886	104,971

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara



Sejak tahun 2017, PDRB Perkapita selalu mengalami peningkatan namun di tahun 2020, PDRB Perkapita mengalami penurunan. Angka PDRB Perkapita di tahun 2019 sebesar 24,11 juta rupiah. Pada tahun 2020, nilainya menurun ke level 23,96 juta rupiah per tahun atau mengalami penurunan sebesar 1,59 persen.

<https://kepsulkab.bps.go.id>

## Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, ketiga institusi ini sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk melakukan konsumsi akhir.

**Tabel 4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Sula, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB)					
a. Rumah Tangga (Miliar Rp)	1,081.70	1,170.75	1,274.00	1,373.55	1,423.61
b. LNPRT (Miliar Rp)	10.57	11.37	13.99	18.38	16.47
c. Pemerintah (Miliar Rp)	465.19	493.29	557.25	604.24	581.18
Jumlah Konsumsi Akhir (Miliar Rp)	1428.18	1557.46	1675.41	1845.61	1998.10
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	1,792.56	1,948.34	2,117.99	2,294.03	2,499.88
Proporsi (%)	79.94	79.10	80.68	80.47	80.35

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 4.2, proporsi konsumsi akhir di Kepulauan Sula cenderung mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2018, konsumsi akhir baik rumah tangga, LNPRT, maupun pemerintah menyumbang 80,68 persen. Di tahun 2020, proporsi konsumsi akhir menurun ke level 80,35 persen. Adanya kecenderungan proporsi konsumsi akhir untuk

menurun menunjukkan bahwa total PDRB perlahan mulai diperkuat oleh komponen lain seperti investasi yang dalam hal ini ialah PMTB.

Berdasarkan teori makro ekonomi, dalam keadaan normal, pola konsumsi baik rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah akan selalu mengalami peningkatan. Pada dasarnya kebutuhan manusia akan bertambah dari waktu ke waktu. Peningkatan kebutuhan tersebut diiringi dengan inflasi atau peningkatan nilai barang dan jasa sehingga menyebabkan peningkatan nilai konsumsi akhir ketiga institusi tersebut dalam PDRB ADHB.

<https://kepsulkab.bps.go.id>

## Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

“**ICOR**” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter “Nilai Tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak “K” unit.

Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana:  $I_t$  = PMTB tahun ke t

$Y_t$  = Output tahun ke t

$Y_{t-1}$  = Output tahun ke t-1

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat dilihat bahwa nilai ICOR mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2017–2019. Adapun penurunan angka ICOR ini menunjukkan perubahan baik dalam proses produksi. Penurunan angka ICOR merupakan indikasi terjadinya efisiensi terutama efisiensi penggunaan dan pemeliharaan kapital dalam mencapai suatu output tertentu. Artinya, semakin sedikit kapital yang diperlukan untuk mencapai output yang diinginkan pada periode tertentu.

**Tabel 4.3 Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Kepulauan Sula, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	1,395.65	1,463.03	1,544.54	1,641.30	1,647.95
Perubahan (Miliar Rp)	67.84	67.38	81.51	96.77	6.65
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	449.65	483.75	462.74	426.85	339.76
<b>ICOR</b>	6.63	7.18	5.68	4.41	51.08

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2017, ICOR Kepulauan Sula mencapai angka 7,18. Kondisi ini berarti bahwa untuk menambah 1 unit output diperlukan penambahan kapital sebesar 7 unit. Pada tahun 2018 dan angka ICOR Kepulauan Sula mengalami penurunan menjadi masing-masing sebesar 5,68 dan 4,41. Hal ini menunjukkan adanya perubahan tambahan kapital yang diperlukan untuk menghasilkan 1 unit output. Untuk menambah 1 unit output di tahun 2018, diperlukan 6 unit kapital sedangkan untuk menambah 1 unit output di tahun 2019, diperlukan semakin sedikit kapital yaitu sebanyak 4 unit.

Akan tetapi di tahun 2020, angka ICOR Kabupaten Kepulauan Sula kembali melonjak tinggi. Tercatat ICOR pada tahun 2020 mencapai 51,08. Artinya, untuk menghasilkan 1 unit output di tahun 2020, diperlukan sebanyak 51 unit kapital. Kondisi ini berkaitan dengan melambatnya nilai total PDRB ADHK di tahun 2020. Penurunan nilai PMTB yang tidak sebanding dengan lambatnya laju PDRB menyebabkan peningkatan nilai ICOR yang tajam. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa proses produksi di tahun 2020 membutuhkan kapital yang besar namun memberikan output yang kurang maksimal.

<https://kepsulkab.bps.go.id>





# **PENUTUP**





1. Unit institusi dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2016 s.d 2020, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan PDRB menurut pengeluaran tahun 2016 s.d 2020 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula terhadap ekonomi luar daerah.

<https://kepsulkab.bps.go.id>

# LAMPIRAN





Tabel 1. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula (Miliar Rupiah), 2016-2020

KOMPONEN	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Konsumsi Rumah Tangga	1,081.70	1,170.75	1,274.00	1,373.55	1,423.61
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	10.57	11.37	13.99	18.38	16.47
3. Konsumsi Pemerintah	465.19	493.29	557.25	604.24	581.18
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	536.11	588.81	587.17	570.15	469.38
5. Perubahan Inventori	(14.48)	31.45	37.77	8.29	(18.02)
6. Net Ekspor	(130.73)	(177.68)	(183.00)	(94.02)	42.91
<b>PDRB</b>	<b>1,948.34</b>	<b>2,117.99</b>	<b>2,287.17</b>	<b>2,480.59</b>	<b>2,515.53</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Tabel 2. PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula (Miliar Rupiah), 2016-2020

KOMPONEN	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Konsumsi Rumah Tangga	809.22	844.63	883.06	920.85	929.27
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	8.16	8.59	9.88	12.56	11.26
3. Konsumsi Pemerintah	341.51	350.74	377.42	403.09	384.68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	449.65	483.75	462.74	426.85	339.76
5. Perubahan Inventori	(10.48)	14.28	12.20	4.47	(9.33)
6. Net Ekspor	(202.41)	(238.95)	(200.77)	(126.53)	(7.69)
<b>PDRB</b>	<b>1,395.65</b>	<b>1,463.03</b>	<b>1,544.54</b>	<b>1,641.30</b>	<b>1,647.95</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula (Persen), 2016-2020

KOMPONEN	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Konsumsi Rumah Tangga	5.03	4.38	4.55	4.28	0.91
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	5.34	5.27	15.04	27.15	-10.39
3. Konsumsi Pemerintah	1.75	2.70	7.61	6.80	-4.57
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.40	7.58	-4.34	-7.76	-20.40
5. Perubahan Inventori	NA	NA	NA	NA	NA
6. Net Ekspor	NA	NA	NA	NA	NA
<b>PDRB</b>	<b>5.11</b>	<b>4.83</b>	<b>5.57</b>	<b>6.27</b>	<b>0.41</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara



Tabel 4. Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula (Persen), 2016-2020

KOMPONEN	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.92	5.62	3.70	4.19	3.46
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	6.26	3.86	2.17	6.90	1.60
3. Konsumsi Pemerintah	3.53	3.10	3.25	5.04	1.32
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.98	1.60	2.09	5.83	0.90
5. Perubahan Inventori	-16.45	37.97	59.41	-24.15	8.26
6. Net Ekspor	28.89	-13.99	15.12	31.33	-33.40
<b>PDRB</b>	<b>3.41</b>	<b>3.70</b>	<b>2.29</b>	<b>2.06</b>	<b>1.00</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula (Persen), 2016-2020

KOMPONEN	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Konsumsi Rumah Tangga	55.52	55.28	55.70	55.37	56.59
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0.54	0.54	0.61	0.74	0.65
3. Konsumsi Pemerintah	23.88	23.29	24.36	24.36	23.10
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27.52	27.80	25.67	22.98	18.66
5. Perubahan Inventori	-6.71	-8.39	-8.00	-3.79	1.71
6. Net Ekspor	55.52	55.28	55.70	55.37	56.59
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara





# DAFTAR PUSTAKA



1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. \_\_\_\_\_, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. \_\_\_\_\_, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. \_\_\_\_\_, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. \_\_\_\_\_, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://kepsulkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

Jln. Yos Sudarso KM. 10, Desa Pohea, Kec. Sanana Utara  
Kepulauan Sula - Maluku Utara, 97795

 [kepsulkab.bps.go.id](https://kepsulkab.bps.go.id)  [bps8203@bps.go.id](mailto:bps8203@bps.go.id)